

KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

Oleh : Muhammad Redy Alvan
Email : redybks@gmail.com
Pembimbing : DR. Hasanuddin, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM.12,5
Simpang Baru Pekanbaru 282903
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

There are different things from the view of Ibn Khaldun the focus of political science itself. In line with Aristotle that human beings are involved in politics (zoon politicon), that the main object of study is the man himself and his relationship with the universe. Simply put, Ibn Khaldun puts man as great as a regulator of the life on earth.

Keywords : Thinking, Power

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Didalam aktivitas berpolitik tidak pernah lepas dari substansi yang berkaitan dengan kekuasaan. Berbicara mengenai kekuasaan tentu saja erat hubungannya dengan mempengaruhi orang lain dan konsep kekuasaan ini memiliki ruang yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi karena kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. (Meriam Budiardjo, 2009 : 17). Jadi, kekuasaan merupakan kekuatan mempengaruhi individu atau kelompok lain dan dapat dimiliki oleh setiap orang.

Dari sekian banyak stegmen, opini, defenisi dan pembahasan mengenai tema kekuasaan ini, ada hal yang berbeda dari pandangan Ibnu Khaldun mengenai focus dari ilmu politik itu sendiri. Sejalan

dengan pemikiran Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik (*zoon politicon*), bahwa objek kajian utama adalah manusia itu sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Secara sederhana, Ibnu Khaldun menempatkan manusia sebagai makhluk yang agung sebagai pengatur kehidupan dimuka bumi.

Ibnu Khaldun bukanlah nama baru dalam diskursus keilmuan Islam dan sosial. Walaupun namanya sempat tenggelam dan mungkin dianggap telah ketinggalan zaman, dalam waktu tertentu dia juga akan ditampilkan sesuai tuntutan realitas, termasuk sekarang ini dalam perbincangan tentang kepemimpinan nasional. Pemikiran Ibnu Khaldun sangat layak diangkat mengingat para pemikir muslim maupun Barat sama – sama mengagumi konsepsi politiknya dan mereka menganggap Ibnu Khaldun sebagai kekayaan dunia yang harus dilestarikan dan direproduksi.

Mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terhadap kekuasaan sangat banyak substansi yang membahas tentang urgensi – urgensi dari kekuasaan itu sendiri, tentunya membahas tentang kekuasaan suatu negara yang berbentuk monarki atau kerajaan. Seperti yang telah diutarakan pada kitab beliau yang sangat terkenal yakni “*Mukaddimah Ibnu Khaldun*” mengeksplorasi pembahasan – pembahasan mengenai kekuasaan itu sendiri. Ibnu Khaldun berpikiran bahwasannya bangsa – bangsa liar lebih mampu meraih kekuasaan dibanding yang lain karena keliaran mereka membuat mereka bersikap nekat dan pemberani.

Ketika sistem kehidupan primitif menjadi faktor pendorong mereka menjadi pemberani, maka tak mengherankan generasi yang liar ini memiliki keberanian lebih besar dibandingkan generasi yang lainnya. Mereka lebih mampu mencapai kemenangan dan merampas segala sesuatu yang dimiliki bangsa lain bahkan dalam suatu generasi terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lain karena perbedaan masa. (Ibnu Khaldun, 2001 : 216). Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bangsa yang hidup liar inilah memiliki kekuasaan yang lebih luas. Sebab mereka lebih mampu menggapai kemenangan atau kekuasaan dan bersikap otoriter.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis telah kemukakan, maka dapat diangkat masalah yang akan menjadi fokus penelitian untuk dijadikan bahan kerangka penulisan ini adalah : Bagaimana Kekuasaan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun ?

Tujuan Penelitian

1. Secara umum adalah untuk menganalisis kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun.
2. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui substansi kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun, *kedua*, mentelaah secara rinci siapa yang seharusnya menjadi pihak yang berkuasa, *ketiga*, mengetahui cara dan mekanisme penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, *keempat*, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggung jawaban kekuasaan menurut Ibnu Khaldun.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis peneliti ini dapat menambah referensi dan pengentahuan didalam pembelajaran ilmu politik seperti studi pengetahuan tentang pemikiran – pemikiran politik dan kekuasaan didalam studi ilmu politik.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pegangan dan bahan bacaan individu baik bagi mahasiswa, maupun dosen yang mengembangkan mata kuliah pemikiran – pemikiran politik dan terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin mendalami serta

mempelajari tema yang sejalan dengan pemikiran politik, Ibnu Khaldun, dan kekuasaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ulul Albab adalah manusia berpikir (insan al – nathiq). Tentu saja, dalam proses berpikirnya itu ada sesuatu yang dipikirkan. Sesuatu yang dipikirkannya itulah yang dimaksud dengan objek berpikir. sesuatu yang dipikirkannya itu adalah sarwa yang ada (maujudad). Sarwa yang ada ini ada yang adanya itu “wajib” dan ada yang adanya itu “mungkin”. (Syukriadi Sambas, 2009 : 35).

Objek Ghair Nisbiyah adalah sesuatu dan adanya tidak bergantung pada adanya sesuatu yang lain. Sedangkan Objek Nisbiyah adalah maujudad yang adanya bergantung pada yang lain. (Syukriadi Sambas, 2009 : 35 - 36).

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat pula dipilah bahwa sesungguhnya pemikiran merupakan sebuah kata benda yakni dari kata dasar “pikir”. Dari kata dasar pikir ini kemudian dapat dikembangkan berdasarkan keterangannya masing – masing yaitu “berpikir” menunjukkan kata kerja, “pikiran” menunjukkan sifat, “pemikir” menunjukkan subjek dan “pemikiran” menunjukkan proses yang akan menghasilkan sebuah kebijakan.

Gatel membedakan kedua macam pemikiran politik. *Pertama*, pemikiran politik yang bertujuan mempertahankan keadaan – keadaan politik yang ada. Ini disebutnya dengan pemikiran politik yang bersifat konservatif. Pemikiran politik konservatif puas dengan

menjelaskan sistem politik dari zaman tersebut dan bertujuan mempertahankan status quo. Pemikiran politik yang konservatif dikemukakan terutama oleh kelas yang berkuasa. *Kedua*, adalah pemikiran yang bersifat kritis yang merupakan kebalikan dan antipode daripada pemikiran politik yang bersifat konservatif itu. Pemikiran politik yang kritis timbul sebagai tantangan terhadap keadaan politik yang ada. Pemikirannya berusaha menampakkan kekurangan – kekurangan serta kelemahan – kelemahan sistem politik yang ada pada waktu itu. Dengan jalan mengkritik dan menilai tertib sistem politik saat itu. (F. Isywar, 1980:36).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk membahas mengenai pemikiran politik Ibnu Khaldun ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menggunakan suatu metode mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, kemudian menganalisa data, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. (Lexy J. Moleong, 1998 : 30).

Sementara tujuan dari penggunaan jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Mardalis, 2004 : 26).

Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya terkait dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kekuasaan.

Jenis dan Sumber Data

Data agregat yang merupakan data yang pernah diolah oleh orang lain berupa para ilmunan, ahli dan tokoh – tokoh pemikir yang belum pernah dipublikasikan maupun yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku – buku, jurnal ilmiah, modul dan artikel. Dan dalam penelitian ini sumber data merupakan penunjang dari jalannya penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan berupa data sekunder yaitu sumber data yang digunakan berupa catatan – catatan atau suatu peristiwa yang jaraknya jauh dari sumber orisinil, seperti : Catatan resmi, foto – foto, surat kabar, dokumen resmi, buku harian, surat – surat pribadi dan lainnya. (Mardalis, 2004:48)

Teknik Pengumpulan Data

Bentuk penelitian ini adalah library research (penelitian keperpustakaan), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi serta menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan.

Penelitian library research ini dilakukan dengan menggantungkan dari sumber – sumber kepustakaan (Mukhtar, 2013 : 20).

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggali informasi atau pesan dari bahan – bahan tertulis yang tersedia berupa buku – buku, dokumen, majalah dan surat kabar. Sumber data primer adalah buku –

buku karangan Ibnu Khaldun itu sendiri seperti Mukaddimah. Adapun sumber data sekunder berupa buku – buku pemikiran politik atau buku – buku yang mengkaji masalah kekuasaan yang dikarang oleh para pemikir - pemikir politik lainnya. Kemudian data – data tersebut akan dihimpun dan diolah dengan analisis dan interpretasi serta studi komparasi sehingga dapat memberi pengertian sebagai jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan sebagai objek penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dilakukan pada situasi wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, metode ini lebih berasarkan kepada filsafat fenomenologis yang merupakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2009 : 78).

PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan 732H / 27 Mei 1332 M. Keluarganya termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 H. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ia menyebut asal – usulnya dari bangsa Arab

Hadramaut, dan silsilahnya dari Wail Ibn Hajar. Kakek Khaldun yang pertama kali menginjakkan kaki di Andalusia bernama Khalid dan dikenal dengan nama Khaldun Ibn Usman Ibn Hani Ibn al-Khatab Ibn Kuraib Ibn Ma'adi Karib Ibn al-Haris Ibn Wail Ibn Hajar. Jadi, menurut silsilah ini, Ibnu Khaldun merupakan salah seorang keturunan salah satu suku Arab Yaman tertua.

Adapun asal – usul Ibnu Khaldun menurut Ibnu Hazm ulama Andalusia yang wafat tahun 457 H/1065 M, disebutkan bahwa keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut di Yaman, dan kalau ditelusuri silsilahnya sampai kepada sahabat Rasulullah yang terkenal meriwayatkan kurang lebih 70 Hadist dari Rasulullah yaitu Wail bin Hujur. Nenek moyang Ibnu Khaldun adalah Khalid bin Usman, masuk Andalusia (Spanyol) bersama – sama para penakhluk kebangsaan Arab sekitar abad ke VII M, karena tertarik oleh kemenangan – kemenangan yang dicapai oleh tentara Islam. Ia menetap di Carmona, satu kota kecil yang terletak di tengah – tengah antara tiga kota yaitu Cordova, Granada dan Seville, yang di kemudian hari kota ini menjadi pusat kebudayaan Islam di Andalusia. (Irfan Firdaus, 2014 : 179).

Selama ini ada kecenderungan untuk memandang sosiologi hanya sebagai fenomena modern dan barat. Namun, sebaliknya, beberapa cendekiawan telah mengembangkan sosiologi sejak lama dan di belahan dunia lain. Salah satu contoh adalah Abdul Rahman Ibnu-Khaldun. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004 : 6).

As-Sakhawi menulis bahwa dia dimakamkan di pemakaman sufi

di luar Babun Nasr, al-Makrizi mengatakan bahwa pemakaman ini terletak di antara sejumlah makam yang dibangun para amir dan bangsawan pada abad ke-8 H, di luar Babun Nasr di jurusan Ar-Raidaniyyah (sekarang al-Abbasiyyah). Pemakamannya dibuat para sufi dari Khanaqah As-Salahiyyah sekitar akhir abad ke-8 dan khusus pemakaman para sufi. Sang Sejarawan, sebagaimana sudah kita ketahui, pernah menjadi pengelola Khanaqah Sufi Baibar. (Muhammad Abdllah Enan, 2013 : 125).

Karya – Karya Ibnu Khaldun

1. Kitab Mukaddimah

Kitab Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab al-'Ibar, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. (Irfan Firdaus, 2014 : 185).

2. Kitab al-'Ibar

Kitab al-'Ibar, wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi as-Sulthani al-'Akbar. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab 'Ibar, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya

yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara). (Irfan Firdaus, 2014 : 185-186).

3. Kitab al-Ta'rif

Kitab al-'Ibar di tutup dengan beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun sendiri sebagai pengarang (otobiografi) yang dikenal dengan nama kitab al-Ta'rif. Riwayat hidup ini dimulai dengan kelahirannya dan diteruskan sampai tahun 797 Hijriah. Ada kutipan lain dari al-Ta'rif yang masih tersimpan baik di Mesir. Kutipan ini menceritakan kejadian – kejadian dalam hidupnya sampai beberapa bulan sebelum ajalnya tiba. (Teguh Pramono, 2012 : 228).

Substansi Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Didalam kitab Mukaddimah, Ibnu Khaldun membicarakan istilah "Al-Mulk yang dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang

kondisi sosial politik di negara – negara Arab-Islam yang sering dililit konflik antar elit kekuasaan. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui suatu kemenangan kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun sepiritual, sehingga untuk memperoleh suatu kekuasaan itu melalui kompetisi – kompetisi menggemparkan dan hanya sebagian kecil orang yang rela menyerahkannya.

Kekuasaan merupakan jabatan, kedudukan yang alami bagi manusia. Sebab, manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidupnya dan melanggengkan eksistensinya kecuali dalam sistem kemasyarakatan dan saling membantu diantara mereka dalam upaya memperoleh kebutuhan – kebutuhan pokok. (Ibnu Khaldun, 2001 : 328).

Pihak Berkuasa Dan Mekanisme Penguasa Menjalankan Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

1. Raja

Sebagaimana diketahui bersama, raja merupakan pemegang tahta kekuasaan tertinggi didalam sebuah negara. Raja/Sultan memiliki beberapa simbol dan atribut yang menjadi tuntutan kewibawaan dan kebesarannya yang dikhususkan baginya. Dengan mengenakannya, ia akan tampil berbeda dari rakyat, pengiring dan para pemimpin lain dalam daulahnya.

Ibn Khaldun memberikan tipologi bentuk pemerintahan yakni: *Pertama, Al-Mulk* natural Artinya, seorang raja dalam memerintah

lebih mengikuti keegoisan dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Pemerintahan jenis ini menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional. *Kedua, Al-Mulk* Politik yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudharatan. Pemerintahan jenis ini serupa dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusional yang dapat mewujudkan keadilan hanya pada batas-batas tertentu. *Ketiga, Al-Imamah* yaitu pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi semua rakyat baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian. Menurut Ibn Khaldun model ketiga inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran Agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala Negara disebut Khalifah dan Imam. (M. Djiauddin Rais, 2001 : 86-89).

2. Al- Wizarah

Al-Wizarah dalam artian adalah kementrian yang merupakan lembaga tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Kata Al-Wizarah memberikan pengertian pertolongan secara mutlak kepada raja. Sebab kata Al-Wizarah dapat diambil dari kata Al-Mu'azarah yang berarti Al-Muawamah (saling tolong – menolong atau membantu). Bisa juga diambil dari kata Al-Wir yang berarti Ats-Tsaqql (berat), seolah – olah beban dengan reaksinya ini membebani dan memberatkannya sehingga membutuhkan bantuan

secara mutlak. (Ibnu Khaldun, 2001 : 423)

3. Al-Hijabah

Al-Hijabah artinya adalah penjaga pintu. Al-Hijabah ini merupakan gelar khusus dalam pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, bagi orang yang menjaga pintu gerbang penguasa dari akses masyarakat umum. Petugas – petugas ini memiliki kewenangan untuk menutu pintu gerbang atau membukanya sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu – waktu tertentu.

4. Depertemen Pekerjaan Umum dan Retribusi

Ketahuilah, pekerjaan umum dan perpajakan merupakan depertemen dalam pemerintahan yang bertugas menangani retribusi, menjaga dan melindungi hak – hak kerajaan dari segi pendapatan dan pengeluaran, mendata seluruh nama – nama personel militer dan menentukan besar kecilnya gaji mereka, dan menyerahkan upah dan gaji mereka pada waktunya. (Ibnu Khaldun, 2001 : 435).

Pelaksanaan operasional tugas – tugas ini mengacu pada aturan – aturan yang telah dirumuskan kepada operasi pajak dengan bekerja sama dengan pegawai pemerintah.

Aturan – aturan tersebut telah dirumuskan dan ditulis secara terperinci dalam sebuah buku, baik mengenai pendapatan maupun pengeluaran yang sangat bergantung pada perhitungan yang akurat. Tugas ini tidak dapat dipercayakan kecuali kepada orang yang berkopeten dalam mengerjakannya. Dan tugas ini hanya terdapat dalam kerajaan – kerajaan yang memiliki kekuasaan kokoh dan kuat, serta mampu mengawasi seluruh wilayah

kekuasaan dengan tata administrasi yang baik.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tugas ini dilimpahkan kepada orang yang memiliki kewenangan mengawasi dalam hal pekerjaan umum dan retribusi itu sendiri. Adapun hukum – hukum syariat yang membahas tentang tugas – tugas ini, hal – hal yang berhubungan dengan kemiliteran, Baitul Mal dari segi pasukan maupun pengeluaran, membedakan daerah – daerah apakah dikuasai dengan cara damai ataukah perang, pelimpahan tugas ini kepada orang yang memenuhi kriterianya, syarat orang yang mengawasi, yang menulis dan memahami tata depertemen pekerjaan umum dan retribusi itu sendiri.

5. Bidang Korespondensi dan Sekretariat Kerajaan

Tugas ini bukanlah tugas primer yang selalu ada dalam kekuasaan kerajaan. Sebab pada kenyataannya banyak daulah atau kerajaan yang tidak menerapkannya sama sekali, sebagaimana negara – negara kuno dipedalaman yang belum tersentuh oleh kemajuan peradaban dan perkembangan keterampilan – kerajinan. Kebutuhan daulah islam pada hal ini menjadi nyata semata – mata karena bentuk bahasa dan karena tuntutan balaghah dalam mengemukakan berbagai maksud. Karenanya banyak ungkapan tertulis lebih dapat menyampaikan hakikat yang dimaksud pengungkapannya secara lebih fasih daripada ungkapan lisan.

6. Kepolisian

Pada masa daulah kerajaan terdahulu, kepemimpinan kekuasaan polisi di Afrika disebut dengan istilah *Al-Hakim*. Pada daulah

Andalusia disebut dengan *Shahob Al-Madinah* dan pada dulah Turki disebut *Al-Wali*. Jabatan ini dibawah kepemimpinan panglima angkatan bersenjata dalam pemerintahan dan kadang bisa dipegang oleh kepala negara secara langsung.

Asal mula terbentuknya daulah ini pada masa daulah Abbasiyyah adalah untuk petugas yang menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan, dengan cara melakukan penyelidikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan hukuman – hukuman *had* setelah semua syarat terpenuhi. Sebab tuduhan – tuduhan yang terjadi pada tindak kejahatan tidak ada urusan bagi syariat kecuali untuk memenuhi hukuman – hukuman *had* nya.

Di bidang politik polisi mengatur pemenuhan apa – apa yang menjadi tuntutan –untutannya dengan suatu pengakuan yang dipaksakan oleh hakim apabila hal itu sudah didukung dengan bukti – bukti terhadap apa yang dianut oleh kemaslahatan umum. Orang yang melakukan tindakan penyidikan dan melaksanakan hukuman – hukuman *had* nya setelah itu, ketika hakim menyelesaikan tugasnya, disebut dengan *Shahib Syurthan* (Pimpinan Kepolisian). (Ibnu Khaldun, 2001 : 448).

7. Panglima Armada Laut

Jabatan ini termasuk jabatan termasuk jabatan bagian pemerintahan di kerajaan Maghrib dan Afrika. Jabatan ini terpusat kepada panglima angkatan bersenjata dan dalam banyak keadaan berada dibawah kewenangannya. Dalam tradisi mereka komando angkatan laut disebut dengan *Balamand*, diambil dari bahasa orang – orang Franka. (Ibnu Khaldun, 2001 : 450).

Mekanisme Pertanggung Jawaban Penguasa Atas Kekuasaannya

Dilihat dari simbol dan kebesaran yang dikenakan, wewenang atau otoritas yang digunakan, serta pengawalan atau penjagaan yang diperketat atas beliau, maka jelas lah seorang saja/sulthan merupakan pihak yang paling berkuasa didalam suatu pemerintahan negara.

Berkaitan dengan sistem politik, Munawir Syadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara, pada substansinya menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisi ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana kewenangan kekuasaan dan bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya. (Munawir Sjadzali, 1990 : 2-3).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena keduanya secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada muslihat. Dalam cakupan ini kebutuhan manusia terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan dan lain – lain adalah termasuk bagian tanggung jawab politik dan kekuasaan.
2. Kekuasaan akan bertahan lama jika pendukung atau fanatisme dari pihak yang berkuasa tersebut tergolong

kuat dan berpengaruh. Fanatisme merupakan modal utama untuk melindungi dan mempertahankan diri atas kekuasaan yang didapat.

3. Bangsa – bangsa yang hidup liar lebih mudah memperoleh kekuasaan. Karena dengan kelarian mereka bersifat nekat dan berani. Dan bangsa yang hidup liar ini memiliki kekuasaan yang lebih luas jika dibandingkan dengan bangsa lain.
4. Karakter dasar dari kekuasaan adalah menikmati sendiri kekuasaannya dan cenderung hidup bermewah – mewahan seperti layaknya Raja dan pejabat – pejabat kerajaan lainnya.
5. Kekuasaan lebih dahulu muncul, barulah terbentuk suatu kerajaan. Kekuasaan mengharuskan warganya mendiami Amshar karena letak dan pusat dari kekuasaan itu adalah Amshar sedangkan kota – kota beserta bangunan – bangunannya terbentuk oleh banyak kekuasaan.
6. Pihak yang paling berkuasa adalah Raja. Karena raja memiliki simbol – simbol kehormatan khusus yang membedakan dia dengan khalayak umum. Raja bisa memerintah dan perintahnya wajib ditaati oleh pengikut – pengikutnya.
7. Jabatan – jabatan kekuasaan dalam kerajaan meliputi Alwizarah (kementerian), Alhijabah (penjaga pintu), Depertemen dan Pekerjaan Umum Retribusi, Bidang Korespondensi dan

Sekretariat Kerajaan,
Kepolisian dan Panglima
Armada Laut.

8. Mekanisme pertanggung
jawaban yang dilaksanakan
oleh para penguasa –
penguasa yang terlibat dalam
kekuasaan yakni dengan
bekerjasama, saling tolong –
meolong dalam berbagai
aspek yang berhubungan
dengan jabatan
kekuasaannya.
Menumbuhkan rasa
solidaritas dan persatuan
yang kuat serta berpartisipasi
dalam memajukan wilayah
yang menjadi pusat
kekuasaan.

Saran

Ibnu Khaldun tidak diragukan lagi boleh disebut sebagai tokoh sosiolog dunia islam. Karya – karya beliau terbukti dan diakui kebenarannya oleh mayoritas ilmuwan – ilmuwan terkemuka didunia baik didunia Islam maupun Barat. Tidak ada salahnya kita mesosialisasikan pemikiran – pemikiran beliau demi membuka wawasan ilmu pengetahuan untuk kita pelajari bersama. Namum, seiring berjalannya waktu nama sejarawan terkemuka ini mulai tenggelam, bisa dikatakan menghilang dari permukaan bumi pendidikan dan ilmu pengetahuan dikarenakan banyaknya teori – teori moderen terutama teori pemikiran – pemikiran dunia Barat yang di implementasikan oleh pendidik di dunia pendidikan. Bukan berarti kita tidak menggunakan teori Barat, tapi alangkah baiknya jika nama sejarawan Ibnu Khaldun sekali – sekala di ikutsertakan didalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Meriam, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Politik edisi revisi*. Jakarta : Gramedia
- F. Isywar, 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Bina Cipta.
- Firdaus, Irfan, 2014, *37 Biografi Tokoh Muslim Dunia Paling Berpengaruh*. Yogyakarta : Laras Media Prima.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2004. Nurhadi (penj.). *Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: 2004.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karta Karya.
- Muhammad Abdullah Enan, 2013, *Ibnu Khaldun : His Life and Work*, Kitab Bavan, New Delhi, 1979. (Terjemahan Dr. Machnun Husein, M.Ag dkk).
- Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta : Referensi (GP PressGroup).
- Pramono, Teguh, 2012, *100 Muslim Terhebat Sepanjang Masa*, Diva Press : Yogyakarta.
- Rais, Djauidin, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Sambas, Syukriadi, 2009, *Mantik Kaidah Berpikir Islami*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah*

dan Pemikiran. Jakarta UI Press.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.